



JOKOWI KESAL MOBILITAS BEBAS, EFEKTIVITAS PPKM KANDAS

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari apa adanya. Kebijakan ini tidak efektif," begitu kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan raut wajah tampak kesal dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/01). Tak perlu menunggu statement resmi orang nomor 1 di Indonesia, sebenarnya 'kandasnya' rencana sempurna Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk saat program serupa masih bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa diketahui dari terus melesatnya penularan Covid-19 di negeri ini. Saat ini, tiap hari angka penambahan kasus rata-rata sudah di atas 10.000. Pengamat bilang bila rencana di atas kertas, berbeda dengan penerapan di lapangan, kebijakan pun akananggung alias menjadi 'pepesan kosong'.

Baca Hal 11

ATURAN LENGKAP PERJALANAN SELAMA PPKM JAWA-BALI JILID II

1. Perjalanan di Bali

Pelaku perjalanan via Bali wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19.

Hasil tes RT-PCR berlaku jika pengambilan sampel maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara rapid test antigen berlaku jika sampel diambil maksimal 1x24 jam sebelum berangkat.

Pengguna transportasi darat dan laut juga diwajibkan menunjukkan tes negatif Covid-19.

Rapid test antigen dan RT-PCR berlaku selama 3x24 jam setelah pengambilan sampel.

Setiap pelaku perjalanan ke Pulau Bali juga wajib mengisi aplikasi e-HAC Indonesia.

2. Perjalanan di Jawa

Satgas Penanganan Covid-19 Daerah akan melakukan tes acak menggunakan rapid test antigen terhadap pengguna transportasi umum darat.

Pelaku perjalanan darat juga diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen maksimal 3x24 jam sebelum berangkat.

Pelaku perjalanan udara diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19.

RT-PCR berlaku maksimal 3x24 jam dari pengambilan sampel, sedangkan rapid test antigen berlaku maksimal 2x24 jam.

Pengguna transportasi laut dan kereta api harus menunjukkan keterangan negatif Covid-19.

Baik RT-PCR maupun rapid test antigen berlaku selama 3x24 jam dari waktu pengambilan sampel.

Khusus penumpang kereta api jarak jauh, diperbolehkan tes

menggunakan GeNose.

Anak di bawah usia 12 tahun tidak wajib untuk tes RT-PCR atau rapid test antigen sebelum perjalanan.

Pengguna transportasi darat atau laut yang melakukan perjalanan dalam satu aglomerasi perkotaan tidak wajib menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Sebagai gantinya, Satgas Penanganan Covid-19 akan menggelar tes acak.

Setiap pelaku perjalanan ke dan di dalam Pulau Jawa wajib mengisi e-HAC Indonesia. Aturan ini tidak berlaku bagi pengguna moda kereta api.

3. Daerah Selain Jawa-Bali

Pelaku perjalanan via darat, laut, dan udara ke daerah selain Jawa-Bali wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19.

Tes RT-PCR dan rapid test antigen berlaku 3x24 jam setelah pengambilan sampel.

Pelaku perjalanan di luar Jawa-Bali juga wajib mengisi aplikasi e-HAC. Aturan ini tidak berlaku bagi

pengguna kereta api.

Meski sudah mengantongi hasil tes, pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan jika menunjukkan gejala Covid-19. Mereka wajib menjalani tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri hingga hasil tes keluar.

4. Dari Luar Negeri

Indonesia menutup kedatangan maupun transit warga negara asing. Aturan itu dikecualikan bagi WNA pemegang visa diplomatik atau visa dinas terkait kunjungan pejabat setingkat menteri ke atas.

Pelarangan masuk juga tidak berlaku bagi WNA yang memegang KITAS, KITAP, dan izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga.

Baik WNI ataupun WNA wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR dari negara asal. Mereka juga wajib mengikuti tes RT-PCR setelah tiba di Indonesia.

WNI dan WNA diwajibkan isolasi selama 5 hari. WNI diisolasi di tempat yang disediakan pemerintah. Sementara WNA harus isolasi di tempat akomodasi karantina dengan biaya sendiri.

Jika hasil RT-PCR di Indonesia menunjukkan hasil positif, maka baik WNI ataupun WNA wajib dirawat di rumah sakit. WNI akan dibiayai pemerintah, sedangkan WNA menanggung biaya sendiri.

Jika mereka negatif Covid-19, maka dipersilakan melanjutkan perjalanan.



ANDA MELANGGAR? SURAT TILANG ELEKTRONIK SIAP MELAYANG

Kapolri yang baru saja dilantik, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mencanangkan polisi lalu lintas untuk tidak melakukan tilang di lapangan ke depannya. Sebagai gantinya, polisi akan mengandalkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE).

Satgas E-TLE sudah mencanangkan peluncuran aplikasi E-TLE di sejumlah titik pada 100 hari kerja Kapolri. Di antaranya penambahan E-TLE di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan DI Yogyakarta pada bulan Maret 2021.

Kemudian pada bulan berikutnya sekaligus persiapan dalam pengamanan arus mudik tahun 2021 E-TLE akan diluncurkan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.

E-TLE ini sendiri sudah digunakan di beberapa wilayah. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya. Pelanggar lalu lintas akan dikirimkan surat tilang ke alamat rumah sesuai yang tertera di data kendaraan.

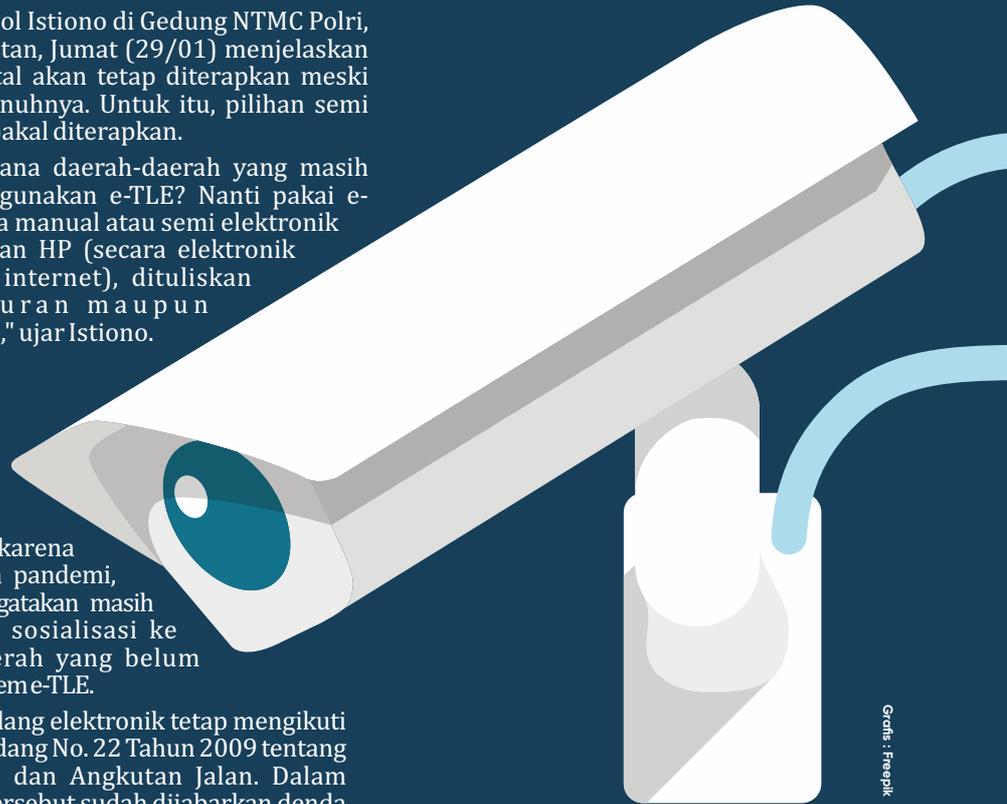
Lalu bagaimana daerah yang belum menerapkan kamera E-TLE? Kakorlantas

Polri Irjen Pol Istiono di Gedung NTMC Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/01) menjelaskan sistem digital akan tetap diterapkan meski belum sepenuhnya. Untuk itu, pilihan semi elektronik bakal diterapkan.

"Bagaimana daerah-daerah yang masih tidak menggunakan e-TLE? Nanti pakai e-tilang secara manual atau semi elektronik menggunakan HP (secara elektronik terhubung internet), dituliskan baik teguran maupun penindakan," ujar Istiono.

Namun karena masih masa pandemi, Istiono mengatakan masih melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang belum memiliki sistem e-TLE.

Denda tilang elektronik tetap mengikuti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut sudah dijabarkan denda maksimal dari pelanggaran lalu lintas. (ist)


Grafis : Freepik

BESARNYA DENDA TERTANGKAP TILANG ELEKTRONIK

Denda tilang elektronik mengikuti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- | | |
|---|-------------|
| • Tidak menggunakan helm SNI, denda | Rp. 250.000 |
| • Tidak menggunakan sabuk pengaman | Rp. 250.000 |
| • Berkendara sambil bermain HP | Rp. 750.000 |
| • Menerobos lampu merah | Rp. 500.000 |
| • Melanggar rambu-rambu dan marka jalan | Rp. 500.000 |



MEKANISME URUS TILANG ELEKTRONIK

1. Polisi punya waktu 3 hari untuk memverifikasi data dan mengirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan
2. Surat konfirmasi terlampir bukti pelanggaran yang dilakukan pengendara
3. Pemilik kendaraan mengonfirmasi pelanggaran dan kepemilikan kendaraan ke polisi dalam tempo 5 hari setelah menerima pemberitahuan
4. Konfirmasi. Bisa juga mengirim Kembali blanko yang diterima posko ETLE Polda Metro Jaya
5. Pemilik kendaraan menerima kode pembayaran virtual melalui Bank BRI. Tenggang waktu pembayaran 7 hari
6. Pasca konfirmasi, polisi mengirimkan surat tilang kepada pemilik kendaraan

Sumber : Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf




Komisiner KPAI Retno Listyarti

KPAI TEMUKAN MASALAH DALAM SEKOLAH TATAP MUKA

Jakarta- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sejumlah masalah dalam penerapan sekolah tatap muka saat pandemi Covid-19 di sejumlah daerah. Masalah yang ditemukan seputar penerapan protokol kesehatan, hingga jenjang sekolah yang dibolehkan untuk melakukan tatap muka.

"Pemantauan melalui pengawasan langsung oleh KPAD, jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia dan pemberitaan di sejumlah media massa," kata Komisiner KPAI Retno Listyarti lewat keterangan tertulis, Minggu (31/01).

Retno mengatakan hasil pengawasan menunjukkan ada daerah yang menggelar pembelajaran tatap muka mulai dari jenjang TK sampai SMP seperti di Kabupaten Dompu, Kota Mataram dan pulau penyangga di Batam. Ditemukan pula pembukaan sekolah dari setingkat Sekolah Luar Biasa hingga SMA sederajat di Riau. Di NTB dan Sumenep, Madura ditemukan pembukaan sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA. Padahal menurut Surat Keputusan Bersama 4 Menteri pembukaan sekolah harus bertahap. PAUD dan TK tidak disarankan dibuka.

Retno mengatakan lembaganya juga menemukan masalah rentang waktu pelaksanaan pelajaran tatap muka. Dia menga-

takan waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka hanya berkisar 3 sampai 4 jam. Namun, ada yang menggunakan sistem shift selama 8 jam, di mana guru bertugas selama 8 jam per hari. Hal tersebut dikhawatirkan meningkatkan resiko tertular Covid-19, karena harus berada di dalam ruangan lebih dari 4 jam.

Masalah juga ditemukan oleh tidak adanya pemetaan materi pembelajaran yang mudah, sedang dan sulit di tiap mata pelajaran. Retno mengatakan klasifikasi itu penting untuk menetapkan apa saja pelajaran yang perlu dilakukan secara tatap muka dan bisa dilakukan secara daring.

Selain itu, ditemukan pula masalah pelaksanaan protokol kesehatan. Dia mengatakan tidak semua daerah mewajibkan tes antigen untuk tenaga pendidik dan siswa secara acak. Retno mengatakan daerah yang telah melaksanakan aturan itu hanya Kota Padang, Kalimantan Barat dan Kabupaten Pangandaran. Adapun saat ini sudah ada 17 kota dan kabupaten yang menggelar sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19.

DPR: Semua Harus Saling Menguatkan

Sementara itu, mengenai sekolah di masa pandemi menurut anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, justru adalah waktu dimana semuanya harus saling menguatkan. "Jangan melawan pandemi itu sendiri. Kenapa kita memaksakan diri untuk tetap sekolah bertatap muka, terus kita memaksakan diri untuk hadir fisik, untuk kuliah secara fisik dan bekerja secara fisik dan lain sebagainya," ujarnya seperti dikutip dari

laman DPR RI.

"Padahal kita tahu bahwa kita baru punya vaksin dan baru menuju ke tahap suntikan kedua," imbuhnya. Karenanya, ia mengajak untuk bersama-sama turut me-kuatkan semua elemen pendidikan seperti guru, siswa dan tak kalah pentingnya saat ini adalah orang tua.

"Orang tua itu tidak pernah menempuh pendidikan sebagai guru, mereka tidak pernah disiapkan sebagai tenaga didik tapi mereka mendadak langsung jadi pendidik, langsung jadi guru di rumah masing-masing," terangnya. Bersatu mengawal pendidikan Disamping itu, peran dan keberadaan orang tua dalam mengawal pendidikan anak memang sering terlupakan. Namun jika guru dan orang tua bisa bersatu, bisa kompak, bisa bersama-sama, tentunya mereka bisa mengawal pendidikan anak-anaknya.(ist)



Komisi X DPR, Putra Nababan

PANTAUAN LENGKAP KPAI TERHADAP PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI 17 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

1. Hasil Pengawasan menunjukkan bahwa ada daerah yang menggelar PTM mulai dari jenjang TK sampai SMP seperti di Kabupaten Dompu, kota Mataram, serta Pulau Penyangga 'Hinterland' di Batam; ada yang dijenjang SLB, SMA/ SMK/ sederajat di Provinsi Riau; ada juga yang buka sekolah di semua jenjang, dari PAUD sampai SMA/ sederajat seperti di se-Provinsi NTB dan di Kabupaten Sumenep (Jawa Timur). Padahal, dalam SKB 4 Menteri pembukaan sekolah harus bertahap jenjangnya. PAUD dan TK belum disarankan dibuka di awal.

2. Waktu pelaksanaan PTM rata-rata hanya berkisar antara 3-4 jam, misalnya di kota Padang yang hanya 3 jam/hari dan di kabupaten Bima 4 jam/hari. Namun ada yang menggunakan sistem shift selama 8 jam, siswanya masing-masing shift hanya 3 jam, namun gurunya bertugas selama 8 jam/hari, misalnya di sebagian sekolah di Lombok Barat. Hal tersebut tentu saja meningkatkan risiko tertular COVID-19 bagi para guru karena terus bekerja dalam ruangan lebih dari 4 jam.

3. Seluruh pemerintah daerah sudah mensyaratkan buka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan dan wajib menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Namun tidak ada daerah yang mensyaratkan pemetaan materi pembelajaran yang mudah, sedang dan sulit di tiap mata pelajaran dan mengharuskan materi sulit dan praktik saja yang dibahas dalam PTM. Materi mudah dan sedang dapat dibahas melalui PJJ

4. Belum semua daerah mewajibkan tes antigen untuk pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Yang mewajibkan tes antigen Pemko Padang hanya pendidik dan tenaga kependidikan saja; Pemprov Kalimantan Barat yang mewajibkan tes antigen kepada seluruh pendidik/ tenaga pendidik dan tes rapid antibody kepada peserta didik. Pemkab Pangandaran juga mewajibkan tes swab antigen kepada pendidik dan peserta didik, jika ditemukan ada yang positif, maka sekolah yang bersangkutan tidak dibuka, begitupun jika di wilayah sekitar sekolah ada yang positif, maka sekolah yang bersangkutan ditutup kembali.

5. KPAI mengapresiasi tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung yang mendatangi dan menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka di dua SMK swasta karena tidak mendapat izin dan melanggar PPKM. Kedua lembaga dimaksud ialah SMK 2 Muhammadiyah dan SMK Al-Azhar. Saat didatangi satgas, di SMK 2 Muhammadiyah sedang berlangsung praktik permesinan dan akuntansi, sedangkan di SMK Al-Azhar digelar praktik kefarmasian, meski jumlah siswa yang hadir amat terbatas. Namun, karena Tulungagung sedang melaksanakan PPKM, maka kegiatan belajar-mengajar di sekolah tidak diperkenankan diadakan. Kedua sekolah tersebut telah diberi teguran dan peringatan keras. Jika melanggar lagi, kedua lembaga pendidikan itu akan dijatuhi denda, penutupan paksa, sampai pengajuan pencabutan izin operasional.

6. Ada daerah yang baru menggelar ujicoba PTM secara terbatas di sedikit sekolah, seperti di Sampit, Bamaang Hulu dan Bamaang Tanah Mas, di wilayah Kabupaten Kotawaringin, hanya 2 SMP Negeri yang ujicoba PTM; Kabupaten Semarang juga gelar PTM terbatas di SD dan SMP Negeri khusus untuk siswa kelas akhir saja yang akan ujian kelulusan sekolah beberapa bulan lagi.

7. Pemerintah kabupaten/kota yang berwenang pada jenjang pendidikan PAUD-SMP lebih banyak yang gelar tatap muka, dibandingkan pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pada jenjang pendidikan SLB dan SMA/SMK hanya 4 yang menggelar PTM yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Barat, khusus Kalbar baru akan gelar PTM pada 15 Februari 2021 yang akan datang.

8. Penutupan sekolah tatap muka setelah dibuka kurang dari satu bulan terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu. Alasan penutupan karena ada warga sekolah yang positif COVID-19, misalnya di SMAN 1 Kota Mataram, dan karena adanya peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan di kota/kabupaten tersebut.



Foto: Ais / LenteraToday



Kapolda Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan menempelmkan sticker pada salah satu cafe di Kota Blitar.

BLITAR - Aparat gabungan TNI-Polri, Sat Pol PP dan Satgas Covid-19 Kota Blitar bertindak tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebanyak 6 cafe diberikan sanksi tipiring dan ditempel sticker, hingga terancam dicabut izin usahanya.

Jika sudah diberikan sanksi tipiring dan menjalani sidang, masih diketahui melanggar akan diberikan sanksi lebih tegas. "Yakni dievaluasi izin usahanya, apakah ditutup sementara atau dicabut izin usahanya oleh Pemkot Blitar," ujar Kasubag Humas, Iptu Achmat Rochan Minggu (31/01) dini hari.

Disampaikannya, Operasi Yustisi dilaku-

6 CAFÉ DI KOTA BLITAR LANGGAR PPKM, IZIN USAHANYA TERANCAM DICABUT

kan sebagai upaya mencegah penyebaran dan memutus rantai penularan Covid-19 di Kota Blitar. Waktu dipilih pada akhir pekan dan saat penerapan PPKM kedua 26 Januari - 8 Februari 2021. "Karena pada malam minggu, biasanya wilayah Kota Blitar selalu menjadi tempat berkumpul atau nongkrong masyarakat," ujar Iptu Rochan.

Seperti yang dilakukan saat Operasi Yustisi skala besar, Sabtu (30/01) malam. Sebelum pelaksanaan Operasi Yustisi digelar Apel Patroli Skala Besar di depan Alun-alun Kota Blitar atau seberang Taman Pecut sekitar jam 19.00 Wib, dipimpin langsung oleh Kapolda Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan dan diikuti oleh personel gabungan dari TNI-Polri, Sat Pol PP dan Satgas Covid-19 Kota Blitar.

Operasi Yustisi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan ini digelar 2 secara stasioner atau berhenti pada satu titik di Jl. Merdeka depan Taman Pecut. Kemudian mobile yaitu berkeliling, menasar tempat usaha seperti cafe, warung kopi dan angkringan yang disinyalir menjadi tempat nongkrong atau berkerumun.

Hasilnya personel gabungan masih mendapati 6 cafe yang melanggar prokes, yaitu jumlah pengunjung melebihi 25% dari kapasitas dan berkerumun atau tidak men-

jaga jarak. Serta melewati batas waktu makan/minum ditempat, sehingga langsung ditindak tegas dengan sanksi pelanggaran tipiring dan dilokasi ditempel sticker bertuliskan "TEMPAT INI MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN".

Bahkan Kapolda AKBP Yudhi juga turun langsung memberikan penjelasan pada pengunjung cafe, yang masih kedapatan melanggar prokes. Agar menjaga jarak tidak berkerumun dan memakai masker. Adapun hasil keseluruhan dari Operasi Yustisi ini ada 19 pelanggaran yang diberikan sanksi tipiring, terdiri dari 6 tempat usaha (cafe) yang diberikan sanksi tipiring, berlokasi di Jl. Melati, Jl. Anggrek, Jl. TGP, Jl. Cokroaminoto, Jl. Dr. Wahidin dan Jl. Anjasmoro.

"Serta 13 lainnya pengunjung yang melanggar prokes, yakni tidak memakai masker," ungkapnya. Kemudian 16 orang diberikan sanksi teguran lisan, serta 8 orang diberikan teguran tertulis.

Iptu Rochan mengingatkan masyarakat, meskipun saat ini sudah dilakukan vaksinasi Covid-19, bukan berarti kondisi sudah aman. Pprotokol kesehatan tetap harus dijalankan. "Tidak hanya 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), ditambah 2 M yaitu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas atau bepergian," jelasnya. (ais)

KOTA MADIUN PERLUAS TRACING HINGGA PANTAU KETAT ISOLASI MANDIRI

MADIUN - 'Perang' melawan pandemi Covid-19 belum berakhir. Kota Madiun pun terus mengencangkan penanganan dan pencegahan wabah dengan berbagai strategi baru.

Walikota Madiun, Maldi mengatakan akan memperluas tracing dan rencananya melakukan 300 swab kepada masyarakat pada Selasa (02/02) besok. Selain itu, bagi warga yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah, akan diberi 'bendera' sebagai penanda khusus rumahnya. Sehingga petugas bisa terus memonitor perkembangannya.

Maldi menjelaskan angka kesembuhan di Kota Madiun meningkat sehingga ruang isolasi menjadi longgar. Dia akan mengencangkan tracing dengan cara swab kepada 300 orang kontak erat. Dengan harapan dapat memperoleh pasien yang benar-benar terkonfirmasi positif Covid-19 dan menekan penyebarannya lebih cepat.

"Hari ini, tempat isolasi di Kota Madiun. Yang kita siapkan ada 71 ditambah 21 ditambah 50 ranjang dari INKA. Tapi cuma terisi 18, rumah sakit terisi 63. Maka kontak erat yang di Kota Madiun ini kita perlebar," jelas Maldi usai apel gelar pasukan disiplin prokes wilayah Korem 081/DSJ, Minggu (31/01) pagi.

Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan segera dirawat dan disembuhkan di ruang isolasi yang telah disediakan. Sehingga angka kematian menurun, angka penyebaran Covid-19 menurun dan angka kesembuhan meningkat.

"Laporan-laporan dari puskesmas, semua akan saya swab. Dengan 300 ini tempat isolasi hampir kosong, siapa yang reaktif kita sembuhkan. Justru di PPKM kedua kita batasi tapi kita tetap fokus masif tracingnya ke orang yang betul-betul kena," ujarnya.

Maldi menjelaskan dia juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk memperluas area tracing. "Tim gugus Kota Kabupaten menyatu untuk rem covid. Walaupun hari Sabtu Minggu tetap kita kerja. Kita evaluasi, kita percepat. Donor plasma kita siapkan," pungkasnya.

Sementara bagi yang menginginkan isolasi mandiri, Pemkot Madiun akan berikan bendera di rumah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Kalau ada yang di swab reaktif. Kalau dia ingin isolasi mandiri, rumahnya akan saya kasih bendera. Akan hati-hati, jangan mendekat dulu sebagai tanda menghindari kerumunan," jelasnya.

Pemberian tanda tersebut dinilai efektif. Karena akan memudahkan petugas kesehatan



Walikota Madiun Maldi usai apel gelar pasukan.

dalam mengontrol kesehatan pasien tersebut dari waktu ke waktu. "Selain itu masyarakat juga bantu pantau. Jadi kalau isolasi mandiri ya gak keluyuran kemana-mana. Upaya-upaya ini dilakukan supaya bisa mendapatkan hasil," imbuhnya.

Sesuai melakukan apel, pasukan langsung menyebar ke lima titik yang telah ditentukan. Yakni untuk melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Hadir dalam apel, seluruh unsur TNI - Polri dan Pemerintah Daerah diantaranya, Wali Kota Madiun Maldi, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Edwin Charles, Kapolda Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Kapolda Madiun AKBP Bagoes Wibisono, Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jatim AKBP Agus Waluyo. (Ger)

Foto: Sahlan Kurniawan / LenteraToday



Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac ke seorang tenaga kesehatan di Gedung Graha YPK Surabaya, Jatim, Minggu (31/1/2021).

LAKUKAN INOVASI REGISTRASI, SURABAYA VAKSINASI 4.000 NAKES

persen. Jika dilihat, target di Surabaya bisa mencapai 100 persen, maka diperkirakan vaksinasi untuk nakes selesai pada minggu ketiga Februari.

"Target 21 Februari selesai, mudah-mudahan bisa terlaksana sampai 2 dosis. Tentu banyak yang harus kami evaluasi lantaran beberapa kota dan wilayah akan dimulai besok. Diprediksi, minggu ketiga dan keempat bisa selesai," tuturnya.

Dante mengapresiasi beberapa hal kegiatan vaksinasi di Surabaya. Salah satunya, modifikasi pendaftaran registrasi secara manual tapi terdigitalisasi. "Itu yang baru saya temukan disini. akan diarahkan data secara central, akan memudahkan bagi nakes yang belum registrasi. Dengan sistem memudahkan pengarahannya secara digital dan masuk ke sistem pencatatan sentralisasi, bisa menjadi contoh daerah lain," katanya.

"Mudah mudahan daerah lain mencontoh di Surabaya. Target yang dicanangkan harusnya bisa selesai 100 persen. Jumlah 4.000 orang lebih yang akan vaksinasi dan ternyata bisa satu hari," sambungnya.

Beberapa yang nakes tidak terdaftar tetap bisa difasilitasi dengan datang langsung membawa ktp, surat tanda registrasi, surat izin praktek, dan surat penugasan

Siapkan 159 Fasyankes

Pemkot Surabaya pun kini tengah mendata sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti vaksinasi Covid 19, setelah tenaga kesehatan sebagai skala prioritas. Rinciannya, pegawai pemerintahan yang bertugas sebagai pelayanan publik. Disusul, TNI, Polri, Satpol PP dan ASN di dinsos dan dispendukcapil. Selain itu, pemkot akan menambah fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 159.

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Bhuana, menjelaskan, selain kepada ASN, pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih banyak lagi, supaya cepat. Sehingga, lanjut Whisnu, akan ada penambahan 159 titik pelayanan kesehatan.

Sebelumnya sudah ada 111, 48 rumah sakit, 63 puskesmas. Kalau ditambah jadi 270. Jika dalam satu titik bisa menerima 50 orang tanpa ada kerumunan. Maka, jika ditotal seluruhnya bisa mencapai 10 ribu lebih.

"Sehingga target kami 6 bulan bisa selesai seluruh masyarakat surabaya," terangnya. "Storagennya juga kami siapkan, akan kami evaluasi kesiapannya titik titik itu dan lokasinya mendekati keramaian," sambungnya. (ard)

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal untuk para tenaga kesehatan (Nakes), Minggu (31/01) di Graha YPK, Rungkut, Surabaya. Tampak hadir Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksiono Harbuwono bersama Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

"Kegiatan vaksinasi aman dan imun, serta sudah memenuhi protokol kesehatan. Aman karena vaksin sudah diteliti dan teruji dengan baik, imun karena nantinya memberikan respon kekebalan bagi imunitas. Protokol kesehatan harus tetap digalakkan karena tidak serta merta langsung membentuk kekebalan. Jadi tetap memakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak," ucap Dante.

Secara nasional, kata Dante, ada 1,4 juta nakes yang harus mendapatkan vaksin pada tahap pertama. Hingga data Sabtu (30/01), sudah 593.370 jiwa divaksinasi atau 39,5

WASPADA! RAMALAN BMKG CUACA EKSTREM BERLANGSUNG HINGGA MARET

Kondisi cuaca belakangan tidak mementu. Sejumlah wilayah di Indonesia bahkan sudah mengalami cuaca ekstrem. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberi peringatan, cuaca ekstrem saat ini masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Bahkan, bisa sampai Maret hingga April.

"Dalam prediksi kami masih akan berlangsung hingga bulan Maret paling tidak. Bahkan mungkin di beberapa wilayah mundur dapat terjadi pula di bulan April," kata Dwikorita dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/01).

Cuaca ekstrem ini disebabkan sejumlah faktor. Misalnya El Nino yang membuat musim kering lebih panjang dan La Nina yang membuat musim hujan lebih panjang. Kondisi ini mulai memberi dampak para keadaan cuaca di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Tak hanya itu, konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer juga menyumbang perubahan iklim.

"Kami tonjolkan adalah data dan fakta menunjukkan tren itu meningkat seiring dengan peningkatan temperatur udara di wilayah Indonesia dan seiring dengan korelatif dengan peningkatan intensitas hujan selama 30 tahun terakhir dan juga semakin seringnya

periode ulang atau semakin pendeknya periode ulang kejadian hujan ekstrem," jelas dia.

Karena itu, Dwikorita meminta semua masyarakat Indonesia menyimak betul pesan Presiden Jokowi terkait perubahan iklim global. Sebab, penyebab dan dampak yang ditimbulkan sudah sangat nyata. "Kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah sesuatu yang nyata bukan hanya isu atau opini tetapi itu sesuatu yang nyata karena BMKG bertugas memonitor gejala dan fenomena tersebut," ucap dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 236 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021 pukul 15.00 WIB. Dari total tersebut, bencana hidrometeorologi masih mendominasi hingga 28 Januari 2021 yaitu bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung.

Catatan BNPB, sebanyak 151 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air, sedangkan tanah longsor 38 dan puting beliung 36. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian, gempa bumi 5 dan Karhutla 1.

Bencana alam menyebabkan 1.522.590 jiwa terdampak dan mengungsi, sedangkan



Dua rumah mewah senilai miliaran rupiah di Perumahan Citraland Bandar Lampung hancur terseret longsor

RENTETAN BENCANA DI INDONESIA

(Data BNPB 1-28 Januari 2021 pukul 15.00 WIB)

TOTAL
236
Kejadian

JENIS

- Bencana banjir 151 kejadian
- Tanah longsor 38 kejadian
- Puting beliung 36 kejadian
- Gelombang pasang 5 kejadian
- Gempa bumi 5 kejadian
- Karhutla 1 kejadian

DAMPAK:

- 1.522.590 jiwa terdampak dan mengungsi
- 193 jiwa meninggal dunia dan 10 hilang
- 3.655 jiwa alami luka-luka.
- 21.322 rumah rusak (1.543 rumah rusak berat, 70 rusak sedang dan 19.709 unit rusak ringan)
- 111 fasum rusak (74 fasilitas pendidikan rusak, 24 fasilitas peribadatan rusak dan 13 fasilitas kesehatan rusak).
- Infrastruktur mengalami kerusakan : 4 kantor rusak dan 25 jembatan rusak.

sebanyak 193 jiwa meninggal dunia dan 10 hilang serta 3.655 jiwa mengalami luka-luka. (ist)

A photograph of IU, a South Korean singer and actress, sitting and looking down thoughtfully. She is wearing a white, puffed-sleeved dress with lace details. Her hands are clasped in front of her, and she appears to be wearing a ring. The background is softly lit with warm, golden light, creating a moody and intimate atmosphere.

IU KEMBALI DENGAN PENUH WARNA DI LAGU CELEBRITY

Penyanyi K-pop Lee Ji-eun atau dikenal sebagai IU telah merilis single dan video musik terbarunya, "Celebrity". Ia kembali dengan nuansa ceria, upbeat dan penuh warna untuk single terbarunya tersebut.

Dikutip dari Soompi (Kamis, 28/1/2021) "Celebrity" adalah lagu prarilis untuk album penuh (full album) kelima yang akan datang.

"Celebrity" sendiri merupakan lagu pop upbeat pertama IU. Pihak agensi, Edam Entertainment, sebelumnya juga sudah mengungkapkan foto single ini, yang memperlihatkan IU berdiri di antara pintu berwarna hijau muda. IU tampak mengenakan gaun elegan berwarna peach dan perhiasan berkilau.

Disusun oleh Ryan S. Jhun, Jeppe London Bilsby, Lauritz Emil Christiansen, IU, Chloe Latimer, dan Celine Svanback, lagu ini bergenre pop elektronik dengan sedikit sentuhan tropical house. Liriknyanya ditulis oleh IU sendiri.

Lagu pra-rilis tersebut dengan cepat naik ke puncak tangga lagu realtime utama Korea Selatan.

Pada pukul 9 malam di hari perilisannya, lagu tersebut telah mencapai peringkat pertama di tangga lagu realtime Bugs, Genie, dan FLO dan meraih posisi teratas di tangga lagu 24Hits Melon.

Ini adalah prestasi yang sangat

mengesankan untuk lagu tersebut yang mencapai puncak tangga lagu 24Hits Melon hanya dalam tiga jam, karena peringkat dihitung berdasarkan akumulasi streaming (40 persen) dan unduhan (60 persen) dari 24 jam terakhir.

Sementara itu, sebelumnya, IU telah membocorkan sedikit mengenai albumnya yang akan datang.

"(Album) membawa cerita penyemangat lebih dari sebelumnya," kata IU yang berharap bisa menyebarkan getaran positif melalui musik kepada orang-orang yang kelelahan.

IU kali terakhir mengeluarkan album pada 2017, melalui "Palette". Album yang mendulang sukses itu terdiri dari lagu-lagu populer, antara lain "Palette" yang menampilkan G-Dragon kemudian lagu "Through the Night."

Pada 18 September tahun lalu, agensinya EDAM Entertainment melalui Instagram membagikan bahwa IU menyumbang ke dua organisasi dengan nama IUAENA, yang merupakan kombinasi dari IU dan UAENA (nama klub penggemar resminya).

"Seperti halnya bunga violet yang lebih indah saat mekar bersama, lebih baik bersinar bersama daripada sendirian. IU dan UAENA paling bersinar saat kita bersama," tulis IU di media sosial agensinya, dikutip dari Soompi, Sabtu.

"Dengan hati kami yang rapuh namun berbinar dalam diam, saya memberikan sumbangan hangat atas nama kami untuk tujuan yang bermanfaat. Terima kasih, dan



aku mencintaimu, UAENA," ujar penyanyi bernama asli Lee Ji-eun itu.

IU menyumbangkan 50 juta won (sekitar 43 ribu dolar AS) untuk Snail of Love dan 50 juta won lainnya untuk Korean Unwed Mothers' Families Association.

Sebelumnya, pelantun lagu "Eight" itu juga menggelar mini konser daring sebagai bagian dari episode spesial "Yoo Hee Yeol's Sketchbook". Ia telah melakukan rekaman pada untuk memastikan bahwa konser gratis ini berjalan dengan lancar.

Bahkan, untuk konser gratis itu IU telah melakukan syuting selama 14 jam di KBS New Public Hall yang berlokasi di Yeouido, Seoul, Korea Selatan (Ant).



Lima Tanda

SUDAH WAKTUNYA GANTI MASKER

Foto: Anna Shvets / Pexels



Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memakai masker menjadi salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan dalam memerangi Covid-19, bersamaan dengan melakukan jaga jarak sosial dan mencuci tangan.

Lalu, agar benda ini bisa maksimal melindungi Anda, sebaiknya kenakanlah dengan benar. Di sisi lain, cari tanda-tanda saat masker perlu diganti. Apa saja tandanya, berikut seperti dilansir dari laman Livestrong (Kamis, 28/1/2021):

1. TIDAK NYAMAN DIPAKAI

Masker yang Anda punya mungkin tampak sempurna sepanjang tahun 2020, tetapi seiring waktu, kain bisa menyusut atau meregang dan tali pengikat bisa kehilangan elastisitasnya.

Periksa apakah tali masker mulai melukai telinga Anda, masker tidak lagi bisa menutupi mulut dan hidung Anda atau Anda kesulitan berbicara apabila tidak menurunkannya. Bila jawabannya iya, maka ini tidak aman.

2. MASKER ROBEK

Masker salah satu benda yang bisa rusak seiring waktu. Pencucian dan pengeringan yang berulang dapat menyebabkan kain robek, muncul lubang, dan longgar.

"Cuci secara konsisten dan pastikan tidak ada sobekan atau lubang pada kain. Pegang kain ke arah cahaya dan perhatikan apakah benangnya menipis. Itu mungkin indikasi yang baik sudah waktunya untuk mengganti masker," tutur Sulmonte.

5. MASKER BELUM DICUCI

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan Anda harus mencuci masker kain setiap kali kotor atau setidaknya setiap hari.

"Semakin lama Anda memakai sesuatu, semakin besar kemungkinannya untuk terkontaminasi dengan bakteri, baik dari mulut Anda sendiri atau di luar," kata dokter spesialis penyakit infeksi di NYU Langone Health, New York City, Scott Weisenberg. (Ant)

3. TERKENA MASALAH KULIT

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan Anda harus mencuci masker kain setiap kali kotor atau setidaknya setiap hari.

"Semakin lama Anda memakai sesuatu, semakin besar kemungkinannya untuk dapat terkontaminasi dengan bakteri, baik itu dari mulut Anda sendiri maupun di luar," kata dokter spesialis penyakit infeksi di NYU Langone Health, New York City, Scott Weisenberg.

4. SUDAH SALAH PILIH SEJAK AWAL

CDC merekomendasikan Anda untuk memilih masker yang memiliki setidaknya dua lapisan, menutupi hidung dan mulut Anda sepenuhnya dan pas di wajah Anda tanpa celah.

Apabila Anda masih menggunakan masker gratis yang diberikan orang lain atau perusahaan tertentu tahun lalu, sekaranglah waktunya untuk meningkatkan dan melindungi diri Anda dan orang lain.



Foto : Istimewa

PEUGEOT E-PARTNER SIAP BERSAING DI SEGMENT KENDARAAN LISTRIK

Peugeot telah mempersiapkan amunisi baru untuk perang di segmen kendaraan listrik..

Perusahaan asal Prancis, Peugeot meluncurkan Peugeot e-Partner di pasar Eropa dan akan bergabung van e-Xpert. Peugeot e-Partner akan meluncur di Eropa akhir tahun ini.

Electric light commercial vehicle (LCV) baru dari perusahaan Prancis ini didasarkan pada platform modular EMP2 dan menggunakan motor listrik dengan torsi 136 PS (134 HP / 100 kW) dan 260 Nm (192 lb-ft) yang ditenagai oleh 50 kWh. baterai ion lithium.

Mengutip laman resmi perusahaan (Rabu, 27/1/2021) Peugeot mengklaim LCV listrik ini dapat berakselerasi hingga 100 km / jam (62 mph) dan hanya dalam 11,2 detik untuk mencapai kecepatan tertinggi 129 km / jam (80 mph).

Peugeot e-Partner yang mengadopsi bentuk van, hadir dengan dukungan baterai

yang besar dengan kemampuan yang menakjubkan. Menurut klaim mereka, Peugeot e-Partner ini mampu menempuh jarak sampai 275 km.

Segmen yang disasar light commercial vehicle (LCV) di mana Peugeot menggunakan platform EMP2 modular.

Dengan bentuk mobil yang besar, maka prinsipal juga sudah mengadopsikan penggunaan baterai bertenaga 50 kWh yang mampu memproduksi tenaga sebesar 134 hp dan torsi maksimal 260 Nm.

Mereka juga mengklaim mobil ini mampu berakselerasi dari posisi diam sampai 100 kph hanya dengan waktu 11,2 detik.

Keunggulan lain yang diboyong Peugeot e-Partner baterai Lithium-Ion yang mengusung teknologi fast charging. Baterai tersebut mampu terisi penuh dalam waktu 5 jam jika menggunakan 11 kW wallbox.

Sedangkan jika menggunakan charger dengan spesifikasi 100 kW, baterai ini langsung terisi 80 persen dalam 30 menit.

Pengemudi dapat memilih tiga mode berkendara yang ditawarkan : Eco, Normal dan Power.

Selain itu, Peugeot e-Partner juga tersedia dalam dua pilihan sesuai keinginan customer, di mana Peugeot menyediakan varian standar dengan panjang 4,4 meter dan varian long dengan 4,75 meter. Sementara untuk trim yang ditawarkan, ada pilihan Professional dan Asphalt.

Mobil ini juga sudah mengusung fitur i-Cockpit yang disesuaikan secara khusus , kontrol e-Toggle yang memungkinkan pengemudi beralih antara Park, Reverse, Neutral dan Drive, dan saklar terpisah untuk 3 mode mengemudi.

Itu juga dilengkapi dengan sat-nav dengan peringatan lalu lintas, pra-pengondisian termal melalui tampilan layar sentuh atau aplikasi smartphone khusus. Dan peningkatan keselamatan pejalan kaki, dengan sinyal yang dapat didengar dengan kecepatan hingga 29 km / jam (18 mph) .(Ist)

LISTSTYLE

Intip Rahasia MEN STYLE 2021

Dunia fesyen tidak hanya penting bagi perempuan. Laki-laki pun turut menyukai perkembangan dan tren yang sedang terjadi. Dengan begitu, mereka bisa menerapkan outfit yang sekiranya cocok. Di tahun 2021 ini, tren fesyen kaum Adam bisa dikatakan mengalami perkembangan dalam hal keberagaman. Nah, buat kamu yang suka banget bermain dengan tren sehari-hari, bis mencoba ini.

1. Outfit bermotif garis vertikal bakal naik daun tahun ini, pilihlah yang garis-garisnya cukup lebar. Motif ini bisa membuatmu terlihat lebih ramping, lho
2. Peacoat bisa jadi outfit buat kamu yang pengen tampil beda. Outer tebal ini dulunya digunakan para pekerja di dermaga, namun kini hadir dengan model lebih modern
3. Hampir semua laki-laki memiliki demin sebagai salah satu fashion item wajibnya. Tahun ini demin berwarna terang dengan model mid-wash bakal lebih dilirik, lho
4. Outfit serba putih adalah salah satu jurus terbaik yang bisa laki-laki kenakan. Padukan kaos putih dengan celana pendek chino dan sepatu kets berwarna, high fashion abis, deh!
5. Menggunakan outer saat musim panas mungkin bukan hal tepat. Tetapi, kamu bisa menggunakan jaket ringan berwarna earth tone dengan dalaman kemeja atau kaos polos
6. Ada pula camp collar shirts yang sedang tren saat ini. Gaya kerah datar menciptakan fokus untuk menyatukan tampilan, cocok banget digunakan saat bermain ke pantai
7. Merah muda pastel adalah warna yang wajib kamu pilih tahun ini. Banyak fashion item yang bisa dipilih, seperti setelan kemeja, outer, hingga kaus oxford berkancing
8. Sandal selalu dianggap tidak keren saat dipadukan dengan outfit lainnya. Namun, sandal tebal dengan model minimalis dan simpel akan jadi tren di 2021, lho
9. Ankle pants juga bisa jadi outfit terbaikmu, lho. Celana di atas mata kaki ini bakal membuatmu terlihat lebih tinggi, sepatumu pun akan lebih on point!
10. Jaket bomber memang sudah pernah jadi tren, namun yang berbahan kulit bakal jadi "sesuatu" di 2021 ini. Tampilan jadi lebih berani dan gagah banget kan. (ist)

Jokowi Kesal (dari hal 1)

Presiden Joko Widodo meminta evaluasi atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM dilakukan. Sebab, kebijakan ini tidak lagi efektif menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari apa adanya. Kebijakan ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1).

Ini nampak dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi. Efeknya, beberapa provinsi mencatatkan kasus positif corona atau Covid-19 tetap naik lantaran mobilitas yang masih tinggi.

Padahal, kata Jokowi, esensi dari PPKM ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat demi menekan laju penularan corona atau Covid-19. Hanya dalam pelaksanaannya, kebijakan PPKM tersebut di lapangan tidak tegas. "Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kebijakan PPKM memang berdampak pada penurunan ekonomi. Hanya penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM dengan cepat mampu menekan kasus positif corona atau Covid.

Menurutnya, jika penanganan corona cepat maka pemulihan ekonomi juga akan lebih cepat. "Jadi coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi. Menurut Jokowi, formula yang standar dalam menghadapi corona memang tidak ada. Negara lain juga belum memilikinya sehingga tidak ada yang bisa dijadikan contoh.

Banyak negara yang juga tengah mencari formula yang pas untuk menahan penyebaran corona. "Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Maka dari itu, Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering untuk memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya, TNI dengan jajarannya, Polri seperti apa. Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," ujarnya.

Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Yang jelas, pemerintah sudah menerapkan kebijakan PPKM untuk menahan penyebaran

virus corona selama dua kali. PPKM tahap pertama berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021. Adapun tahap kedua, dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.

Dalam pelaksanaan PPKM ke II, pemerintah mengendorkan sejumlah aturan. Salah satunya dengan mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Ini lebih longgar dari PPKM pertama mall dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Hanya saja, kasus positif Covid-19 masih terus melambung meski PPKM berlangsung. Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II yang baru berlangsung enam hari, kasus positif Covid di Indonesia bertambah 228.502 kasus.

Secara kumulatif, sejak awal pandemi sampai dengan Minggu (31/1), jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh, dan 29.998.

Mobilitas Harus Dibatasi

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama mengungkapkan, PPKM hendaknya bukan sekadar memodifikasi dengan mengurangi jam operasional dan kapasitas, tetapi juga mencegah mobilitas masyarakat.

Bayu mengatakan, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali hingga 8 Februari 2021 tepat dilakukan. Hanya saja, PPKM Jilid II harus diterapkan dengan jelas dan lebih terukur. Bahkan, penerapannya harus dilakukan dengan lebih ketat.

Menurut dia, PPKM sebelumnya tidak cukup efektif menekan penambahan kasus

COVID-19 di tanah air. "Kebijakan memperpanjang PPKM tepat, asal ada perubahan dan evaluasi PPKM sebelumnya. Mengapa kurang berhasil? Selama ini terkesan hanya ganti nama, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik," kata dia.

Ia menambahkan, hal utama yang harus dicegah dalam kebijakan PPKM adalah mobilitas masyarakat. Bukan tujuan mobilitas seperti pusat perbelanjaan atau mal, tempat makan dan lainnya. Sebab, jika hanya mengurangi jam operasional dan kapasitas, maka kurang efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Ia melihat, akan percuma kalau mobilitas individu ke tempat-tempat lain seperti rumah teman, taman dan lainnya tidak dicegah. Karena masih akan berinteraksi satu sama lain. "Kalau PSBB total sebenarnya akan lebih efektif, karena orang tidak boleh keluar rumah. Kecuali untuk hal yang benar-benar penting seperti membeli makan, belanja, dan berobat," tuturnya.

Sebelumnya, Ahli Epidemiologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi Wibowo mengatakan "Kebijakan PPKM ini kebijakan nanggung. Jadi hasilnya tidak signifikan," katanya. "PPKM esensinya membatasi mobilitas dan kerumunan, namun beberapa hal tidak diimplementasikan secara konsisten dan tegas," sambung Yudhi.

Yudhi mencontohkan, kebijakan dine in di rumah makan sebanyak 25 persen, namun kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya ditaati. "Tempat wisata (out door) malah dibuka? Jam buka mal malah diperpanjang sampai pukul 20.00 WIB. Pasar dan lain-lain, apakah dicek terkait kedisiplinan terhadap protokol kesehatan? Hari Senin kemarin macet di beberapa titik pasar," ujar Yudhi. (ist,ins)

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT JAWA-BALI JILID II

Aturan & Pembatasan

-  Perkantoran Work From Home 75%
-  Tempat Ibadah Kapasitas Maksimal 50%
-  Belajar/Mengajar Daring/Online
-  Fasilitas Umum Ditutup Sementara
-  Sektor Industri Beroperasi 100% dengan Protokol Kesehatan / Proses Ketat
-  Moda Transportasi Diatur Pemerintah Daerah
-  Pusat Perbelanjaan/Mal Tutup Pukul 20.00
-  Restoran Dine-In / Makan di Tempat Maksimal 25%, Tutup Pukul 20.00 Take Away / Pesan Dibawa Pulang Diizinkan



NOW!!!

DUH! PULAU BERSTATUS TAMAN NASIONAL DI RI DIJUAL RP 900 JUTA

Jakarta – Lagi-lagi kasus jual beli pulau di Indonesia terjadi. Kali ini salah satu pulau yang berada di Sulawesi, yakni Pulau Lantigiang yang terletak di Desa Jinato, Kecamatan Bonerate, Kepulauan Selayar menjadi polemik setelah ketahuan dijual kepada seseorang dengan harga Rp 900 juta.

Kasus jual-beli pulau ini terungkap setelah pengelola Taman Nasional Wilayah II Jinato mendapat laporan dari petugas resor Jinato yang menemukan fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Pulau Lantigiang serta surat keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang.

Temuan itu mengejutkan karena masyarakat setempat tidak boleh memiliki tanah di area Pulau Lantigiang karena berstatus dalam kawasan taman nasional. Usut punya usut, transaksi penjualan pulau terjadi kala seorang pria bernama Syamsul Alam alias SA menjualnya ke perempuan bernama Asdianti alias AS. SA disebut mengklaim pulau itu sebagai warisan nenek moyangnya.

"Informasi awal pulau itu punya nenek moyangnya dia, punya nenek-kakek buyutnya," kata Kasat Reskrim Polres Selayar Iptu Syaifuddin, dikutip Minggu (31/01).

Polisi belum memeriksa SA. SA baru akan diperiksa penyidik pada pekan depan. "Kalau dia (SA) ada di Makassar. Makanya nanti dibuatkan panggilan dia. Ya minggu depan," katanya.

Tidak ketinggalan, Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Jinato juga diduga ikut terlibat. Polisi telah memanggil Kades dan Sekdes untuk dimintai keterangan di minggu depan.

Meski tak dijelaskan secara rinci, sosok Asdianti yang membeli Pulau Lantigiang disebut sebagai pengusaha di wilayah Kepulauan Selayar. "Pengusaha dia," katanya.

Selain berlatar pengusaha, Asdianti disebut memiliki suami warga negara (WN) Jerman. Syaifuddin mengungkapkan Asdianti merupakan warga asli Selayar. "Asdianti orang Selayar dia, orang Selayar asli. Suaminya orang asing, ya seperti itu (warga negara Jerman)," katanya.

Dari hasil penyelidikan awal polisi, Asdianti telah membayar uang muka Rp 10



Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar

juta dari total harga pembelian pulau senilai Rp 900 juta kepada lelaki Syamsul Alam alias SA sebagai penjual pulau.

Mendapat kabar ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya angkat bicara. "Saya mendukung langkah Polres Selayar. Karena, jangankan jual-beli pulau, masuk saja ke Taman Nasional itu harus dengan izin petugas, kecuali masyarakat lokal yang dalam kerja sama kemitraan dan pembinaan oleh Taman Nasional. Saya mengikuti terus perkembangan dari Jakarta," ujarnya.

Terpisah, Bupati Selayar Muh Basli Ali pun heran adanya dugaan penjualan Pulau Lantigiang, Sulawesi Selatan, seharga Rp 900 juta. "Pulau Lantigiang ini termasuk kawasan konservasi Taman Nasional Taka Bonerate Selayar. Saya juga heran kenapa ada yang berani melakukan transaksi jual beli tanah," kata Basli.

Pulau yang berpasir putih itu selama ini kosong alias tidak dihuni. Karena itu, setiap yang ada berkegiatan harus berkoordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional Taka Bonerate Selayar. Menurut Basli adanya penjualan Pulau di wilayahnya merupakan ini yang pertama kali.

"Setahu saya ini yang pertama, karena

biasanya kalau ada investor memberitahukan keinginan investor ke Pemda. Langsung kami ingatkan bahwa pulau-pulau di Selayar milik pemerintah," lanjut Basli.

Ia berharap agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Investor yang ingin berinvestasi di Selayar, agar menghubungi pemerintah daerah. Pihaknya juga sudah memberi peringatan kepada para Kepala Desa, agar berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan camat sebelum mengesahkan dokumen tanah.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan, mengaku masih akan mendalami kebenaran informasi tersebut. Namun demikian, pihaknya memastikan jika sebuah pulau tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh satu individu.

"Kalau terkait dengan kepemilikan pulau, satu pulau itu tidak boleh dibeli atau dikuasai oleh satu individu, itu ada di Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2016," katanya. "Berapa persen yang bisa dikuasai, berapa persen yang bisa diberikan haknya kepada masyarakat, berapa persen yang harus dilindungi. Dalam aturan itu dijelaskan, tidak boleh membatasi akses terhadap pulau-pulau itu," ucapnya. (ist)

Foto: Istimewa

DERETAN PULAU RI YANG PERNAH DIKABARKAN DIJUAL

JUNI 2020:

Pulau Malamber, Sulawesi Barat. Pulau tak berpenghuni di Kepulauan Bala-Balakang itu dijual seharga Rp 2 miliar.

TAHUN 2019:

Pulau Dua Barat di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Iklan tersebut mematok harga Rp 234 juta.

TAHUN 2018:

Pulau Ajab, salah satu pulau kecil di Bintan Kepulauan Riau.

TAHUN 2017:

Pulau Ajab di Kepulauan Riau dan Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Pulau Ajab yang jaraknya hanya 20 menit dari perairan Bintan dijual dengan harga US\$ 3,3 juta atau sekitar Rp 46 miliar (kurs: Rp 14.000/dolar US).

TAHUN 2012:

Pulau Gambar di barat daya Kalimantan dan pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat dijual. Harga Pulau Gambar adalah Rp 6,8 miliar. Sementara pulau Gili Nanggu ditawarkan dengan kisaran Rp 9,9 miliar.

TAHUN 2009:

Pulau Makaroni, Pulau Kandui dan Pulau Siloinak di Kabupaten Kepulauan Mentawai